

## MUSIBAH MERPATI

## BPK agar Investigasi Pembelian MA-60

JAKARTA, KOMPAS — Kallangan anggota DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi atas PT Merpati Nusantara Airlines terkait dengan pembelian pesawat MA-60 dari China. Audit dipandang perlu karena Dewan belum memperoleh penjelasan rinci dari manajemen Merpati mengenai kronologis dan penanggung jawab pembelian selama berlangsungnya audiensi pada awal pekan lalu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, di Jakarta, Sabtu (14/5). Menurut Harry, pelaksanaan audit ini sudah menjadi keputusan Komisi XI.

"Kami sudah mengirimkan surat permintaan resmi kepada BPK untuk melangsungkan audit khusus pos *subsidiary loan agreement* (perjanjian penerusan pinjaman) MA-60. Kami menunggu respons BPK secepatnya," kata Harry.

Dijelaskan, Komisi XI belum puas meski telah melaksanakan dua kali rapat dengar pendapat dengan manajemen Merpati, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan. Selama rapat, Harry dan anggota Komisi XI lainnya sudah meminta penjelasan detail soal kronologi dan mekanisme pembelian, tetapi pemerintah dan Merpati belum bisa memberi jawaban terperinci.

Di sisi lain, Komisi XI justru menemukan sejumlah kejanggalan saat mendengarkan penjelasan dari manajemen Merpati, di antaranya keputusan membeli 15 pesawat di saat keuangan Merpati sedang bangkrut; pelaksanaan perjanjian penerusan pinjaman dengan pos APBN 2010, padahal belum ada persetujuan DPR, serta dugaan penggelembungan harga didasarkan pada laporan resmi lembaga sosial ataupun informasi resmi dari negara lain.



**Kami sudah  
mengirimkan surat  
permintaan resmi  
kepada BPK untuk  
melangsungkan audit  
khusus pos 'subsidiary  
loan agreement' MA-60.**

Harry Azhar Azis

"Kami sudah menyimpulkan banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan yang belum terungkap. Karenanya, pascarapat kemarin, kami langsung putuskan perlu ada audit investigasi karena bukan tidak mungkin ada penyimpangan uang negara di kasus ini," paparnya.

Sementara itu, Ketua Forum

Serikat Pekerja BUMN FX Arief Poyuono juga mengungkap sejumlah temuan atas pembelian pesawat Merpati MA-60 itu. Sebanyak empat departemen diduga menjadi penanggung jawab proyek pembelian pesawat tersebut, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Yang perlu diusut adalah siapa penggagas proyek itu. Selanjutnya, walaupun benar ada upaya penggelembungan harga beli pesawat, harus diungkap siapa saja yang menikmati uang korupsi itu. Saat ini, semua temuan sudah kami serahkan kepada KPK dan tinggal tunggu respons atas laporan itu," kata Arief.

Inspektur Kelaikan Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Rizal Ritonga di Medan, seperti dilaporkan Antara, mengatakan, pihaknya telah memeriksa kelayakan terbang dua pesawat jenis MA-60 milik Merpati yang melayani penerbangan di Sumatera Utara. Pihaknya tidak menemukan permasalahan karena kondisinya masih layak terbang.

Pesawat yang diperiksa itu merupakan jenis yang sama dengan pesawat terbang yang jatuh di Kaimana, Papua Barat beberapa waktu lalu. Dua pesawat itu melayani Medan menuju Gunung Sitoli, Aek Godang, di Sumut, dan sekali waktu ke Lhokseumawe, Aceh. (ONI)